



MODAL SOSIAL KOMUNITAS DIFABEL DESA DALAM GERAKAN DESA INKLUSI (STUDI KASUS DESA GULUREJO DAN SIDOREJO, KAPANEWON LENDAH, KABUPATEN KULON PROGO)

The Social Capital of the Rural Diffabled Community Within the Inclusive Village Movement (Case Study of Gulurejo and Sidorejo Villages, Lendah Sub-District, Kulon Progo Regency)

Alivia Nurul Ichسانی¹, Pandhu Yuanjaya².

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 17-06-24

Diperbaiki 20-06-24

Disetujui 24-06-24

Kata Kunci:

Modal sosial, Komunitas Difabel, Inklusi, Partisipasi, Desa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan modal sosial Komunitas Difabel Desa (KDD) Gulurejo dan Forum Difabel Sidorejo (FDS) dalam gerakan desa inklusi. Urgensi penelitian ini terkait dengan praktik marginalisasi, *stereotype*, terbatasnya pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri dan belum optimalnya integrasi sosial yang kerap dialami difabel desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pemaknaan pada unsur-unsur modal sosial seperti kepercayaan, partisipasi dalam jaringan, resiprositas, nilai, norma dan tindakan proaktif mempengaruhi karakteristik serta capaian agenda desa inklusi dari kedua komunitas tersebut. KDD Gulurejo menekankan semangat "*fight against*" yang mendasarkan aktivitas kelompok pada penyelesaian isu difabel lewat upaya internal memperkuat identitas spesifik, menjaga nilai-nilai komunal dan memelihara solidaritas. Sementara itu, FDS terus bergerak progresif mengaktualisasikan semangat "*fight for*" yang merujuk pada upaya pencarian jawaban bersama melalui berbagai bentuk advokasi lintas stakeholder dalam penyelesaian isu difabel desa. Penelitian ini menampilkan praktik baik tentang pengembangan alternatif penyelesaian yang lebih berkelanjutan dimana difabel desa dapat berkontribusi aktif mengcounter *distrust* dalam bentuk hambatan sikap, lingkungan dan kelembagaan sembari mendorong pergeseran intervensi menuju program bermekanisme *bottom-up* yang dilakukan tanpa mengabaikan kapabilitas sekaligus potensi modal sosial dalam penyelesaian masalah bersama.

ABSTRACT

Keywords:

Social Capital, Diffabled Community, Inclusion, Participation, Village

This study aims to explain the social capital of the Komunitas Difabel Desa (KDD) Gulurejo and Forum Difabel Sidorejo (FDS) within the inclusive village movement. The urgency of this research is related to the practices of marginalization, stereotypes, limited fulfillment of self-actualization needs, and the suboptimal social integration that often experienced by rural residents with disabilities. The method used in this research is a case study with a qualitative approach. Data collection techniques were conducted through interviews, observations, and documentation. The research findings indicate that disparity in the interpretation of social capital elements such as trust, participation in networks, reciprocity, values, norms, and proactive actions influence the characteristics and achievements of the inclusion agendas of both communities. KDD Gulurejo emphasizes a "fight against" spirit, focusing group activities on addressing disability issues through internal efforts to strengthen specific identities, preserve communal values, and maintain solidarity. In contrast, FDS progressively actualizes the "fight for" spirit, referring to collective

DOI: <https://doi.org/zxxx/v.vxxx.xxx>

efforts in various forms of cross-stakeholder advocacy to resolve village disability issues. This research highlights good practices in developing more sustainable alternative solutions, where village-based disabled people can actively counter distrust that manifested in attitudinal, environmental and institutional barriers. At the same time, it encourages a shift towards bottom-up intervention programs that won't overlook the capabilities and potential of social capital in addressing common challenges.

1. Pendahuluan

Dewasa ini isu seputar disabilitas hadir menjadi pokok bahasan yang kian menyita perhatian. Eksistensinya bertaut erat dengan sengkabut permasalahan seputar pemenuhan hak, kesetaraan hingga partisipasi yang tak kunjung dapat dimunculkan secara holistik. Hidayatullah dan Pranowo (2018) mengungkap temuan penting bahwa 80% dari keseluruhan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pernah mengalami tindak diskriminasi termasuk kecenderungan pengabaian hak sebagai warga negara [1].

Secara spesifik, hambatan disabilitas di desa kian berkembang menjadi pokok permasalahan serius kala dikaitkan dengan persoalan akses terhadap infrastruktur, mobilitas, ketersediaan alat bantu, pendidikan, dan kesehatan [2]–[3]. Keterlibatan penyandang disabilitas desa dalam musyawarah rencana pembangunan pun masih dirasa jauh dari kata optimal sebab belum sepenuhnya merujuk pada hadirnya partisipasi yang bermakna, sadar dan mandiri. Data SNSAP-PWD (2012) mengungkap temuan bahwa sebanyak 15,29% penyandang disabilitas kategori ringan dan 62,52% penyandang disabilitas kategori berat di desa masih merasa terhambat masuk dan mengikuti organisasi masyarakat [4]. Dilain sisi, penyandang disabilitas desa juga kerap dianggap sebagai sumber rasa malu dan aib keluarga. Inilah yang pada akhirnya membuat mereka kurang dan bahkan tidak diberi interaksi maupun akses yang cukup untuk melaksanakan hak mereka [5]–[6]. Alih-alih mampu mewujudkan prinsip pembangunan "*no one left behind*" dengan klaim kekeluargaannya yang erat, banyak realita menangkap bahwa penyandang disabilitas di desa masih menjadi subyek yang terpinggirkan dalam pemenuhan kebutuhannya akan akses infrastruktur maupun pemberdayaannya [7]–[8].

Fukuyama (1995) dan Levi (1996) mengemukakan bahwa partisipasi publik yang terbatas dapat mendorong terjadinya erosi tatanan sosial. Keterbatasan yang tak kunjung ditanggulangi lewat inisiatif masyarakat memiliki andil besar mendorong minimnya penanganan serta pemberdayaan khususnya terhadap kelompok rentan [9]–[10]. Menanggapi hal ini maka penting untuk menghadirkan nilai serta preferensi masyarakat, komunitas dan warga negara secara keseluruhan yang terbingkai dalam suatu tindakan kolektif [11]. Bertolak dari hadirnya praktik eksklusif yang selama ini meminggirkan difabel desa, tumbuh inovasi penegakan inklusifitas dimana difabel berkumpul menjadi satu membentuk struktur formal berdasar trust hingga akhirnya mampu membangun jaringan dan mendongkrak hadirnya perspektif difabilitas dalam pembangunan desa di Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Inisiatif pembentukan wadah kolektivitas masyarakat seperti komunitas difabel desa menjadi contoh wujud nyata upaya masyarakat mencapai *public purpose* yang belum sepenuhnya dapat diakomodir pemerintah akibat keterbatasan anggaran, sumber daya ataupun hambatan lain yang bersumber dari masyarakat sekitar. Kehadirannya tak jauh dari cita-cita menghadirkan aktualisasi pelembagaan kelompok marjinal yang dapat membuat mereka dilihat, dipercaya dan mandiri mengatasi permasalahan eksklusif sosial.

Melampaui pemikiran praktis yang terus mengaitkan berbagai permasalahan sosial sebagai buntut ketimpangan ekonomi, sengkarut isu difabel nyatanya berakar dari hambatan sikap, lingkungan dan kelembagaan. Eksklusi semacam inilah yang terus hadir dan terefleksikan dalam sengkarut permasalahan seputar isu disabilitas [12]–[13]. Hambatan sikap dan lingkungan ditampilkan dalam ragam praktik stigmatisasi, subordinasi dan marjinalisasi yang muncul dari sikap masyarakat. Difabel desa terus dipatologikan dibawah model medis dan dipinggirkan oleh model ekonomi. Dilain sisi, hambatan kelembagaan terus menempatkan difabel desa dalam posisi yang sama sekali tidak dianggap penting baik di keluarga, masyarakat maupun pemerintahan. Rasa ragu dan minimnya kepercayaan diantara pemerintah dan difabel pun terus meningkat, tak hanya menimbulkan kendala pada upaya penyelesaiannya namun juga bermuara pada semakin besarnya perasaan terpinggirkan yang terus menimbulkan *distrust* difabel terhadap peran pemerintah ditengah realita kian lemahnya gotong royong, rasa kesetaraan sosial, kepedulian dan kebersamaan.

Syahra (2003) dan Haridison (2013) kompak beropini bahwa hadirnya permasalahan-permasalahan yang bersumber dari ketimpangan maupun eksklusi cenderung tak lepas dari realita rendahnya modal sosial ditengah masyarakat [14]–[15]. Soetomo (2018) turut menyinggung bahwa inoptimalitas kebijakan *top down* pemerintah banyak ditengarai oleh hadirnya perspektif pemerintah yang terus mengaitkan permasalahan sosial sebagai konsekuensi ketimpangan ekonomi utamanya pada aspek pendapatan per kapita [16]. Pembangunan terus mengejar kemajuan fisik ditengah kian lemahnya inisiatif dan kebersamaan kolektif. Berlatar dari permasalahan yang muncul dari sistem sosial, modal sosial dinilai dapat menjadi bahan bakar penggerak efektif bagi sepak terjang komunitas. Tanpa terlepas jauh dari diskursus isu disabilitas, modal sosial berimplikasi positif pada terciptanya kelompok masyarakat yang mandiri dan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kesadaran terhadap hadirnya modal sosial dinilai mampu mendorong pelaku perubahan untuk menangkap setiap peluang yang ada guna menyelesaikan kompleksitas masalah, mendorong hadirnya perubahan lebih cepat dan memperbaiki kualitas hidup guna mendapatkan hasil maksimal dari program pembangunan masyarakat/komunitas [15]. Sebagai contoh terkait, Gotto dkk (2010) mengemukakan adanya peran potensial modal sosial bagi penyelesaian permasalahan sosial yang dialami kelompok disabilitas [17].

Kehadiran Komunitas Difabel Desa menjadi gebrakan baru difabel desa mengcounter pemikiran apatis pemangku kebijakan mempertimbangkan pentingnya keterlibatan modal sosial dalam penyelesaian masalah bersama. Ini juga terkait dengan implementasi kebijakan *top-down* yang dirasa masih kurang efektif menjawab akar permasalahan difabel sebab terus membingkai problematika isu difabel sebagai produk sebab-akibat ketimpangan ekonomi. Kehadirannya menjadi bentuk praktik nyata bagaimana masyarakat berupaya mewujudkan *interest* bersamanya mengconter hambatan sosial, lingkungan dan kelembagaan dalam problematika isu difabel. Difabel desa yang kerap dipandang sebagai kelompok paling rentan dan sulit mengakses nilai modal sosial akibat keterbatasan akses dan kepercayaan beraktualisasi justru memanfaatkan segenap potensi modal sosial yang mereka miliki sebagai “bahan bakar” agenda gerakan desa inklusi. Bertolak dari

situ, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan menggunakan pemikiran Hasbullah Jousairi tentang unsur-unsur modal sosial yang terdiri dari kepercayaan, partisipasi dalam jaringan, resiprositas, nilai, norma dan tindakan proaktif untuk menjelaskan modal sosial yang tumbuh dan berkembang dalam aktivitas komunitas difabel desa berikut pula pengaruhnya pada agenda gerakan desa inklusi yang dilakukan KDD Gulurejo dan Forum Difabel Sidorejo

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna menjelaskan modal sosial komunitas difabel desa gulurejo dan sidorejo dalam gerakan desa inklusi. Berlatar dari situ, fenomena penelitian memuat data-data yang bersifat kualitatif. Pemilihan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus membuat peneliti dapat memahami fakta yang muncul dalam suatu kasus, menganalisisnya dengan teori terkait dan menghasilkan saran guna mengoptimalkan kemampuan individu, kelompok, orang maupun situasi sosial yang ada.

Penelitian telah dilakukan pada bulan Januari 2023 sampai November 2023 dengan memilih Desa Gulurejo dan Sidorejo yang terletak di Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo sebagai tempat pengambilan data primer. Pemilihan lokasi dilatarbelakangi oleh keberadaan KDD Gulurejo dan FDS sebagai pionir sekaligus contoh praktik baik pelebagaan difabel desa mewujudkan agenda desa inklusi.

Pemilihan subyek penelitian dilakukan dengan *mixed purposeful* melalui teknik *purposive* dan *snowball*. Subyek penelitian berdasarkan teknik *purposive* meliputi Pengurus, Anggota, Kader, Fasilitator yang merujuk pada tokoh gerakan disabilitas lokal desa, Kepala Desa, Kamituwa, Panewu Kapanewon Lendah serta masyarakat Desa Gulurejo dan Sidorejo. Adapun subyek penelitian berdasarkan teknik *snowball* meliputi Koordinator Program Desa Inklusi SIGAB, Kepala Seksi Perlindungan Sosial Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, Kepala Jawatan Sosial dan Kesejahteraan Kapanewon Lendah, dan TKSK Kapanewon Lendah. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data mentah, transkrip data, pembuatan koding, kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi dan penyimpulan akhir.

Beragamnya informan dalam penelitian ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk dapat melakukan perbandingan tentang apa yang dikatakan, keadaan, pendapat, maupun perspektif dari beragam latarbelakang. Bertolak darisitu, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memeriksa keabsahan data.

3. Hasil dan Pembahasan

Sepak terjang pembangunan cenderung masih didominasi oleh aspek *human capital* dan *produced capital*. Kebiasaan ini kerap menyisakan problematika laten sebab orientasi pembangunan seakan tak jemu mengejar kemajuan fisik tanpa turut mengindahkan kehadiran unsur kultural seperti modal sosial didalamnya [18][19]. Tak jarang, intervensi tersebut justru berkorelasi pada makin terinternalisasikannya budaya ketergantungan. Kemiskinan pun terus menjadi pekerjaan rumah pemerintah di tengah realita kian lemahnya nilai-nilai luhur budaya seperti gotong

royong, rasa kesetaraan sosial, kepedulian dan kebersamaan [16]. Pemerataan ekonomi terasa sulit diwujudkan pun begitupula dengan kesejahteraan yang tak kunjung dapat lekas terealisasikan sesuai kebutuhan serta aspirasi tiap-tiap sasaran program.

Bertolak dari pendapat Soetomo (2018) tentang inoptimalitas kebijakan pengentasan kemiskinan bagi kelompok rentan, peneliti mendapati benang merah bahwa hadirnya ide mendekatkan inklusi ke desa menjadi wujud upaya nyata difabel merespons berbagai program kebijakan yang tak kunjung berpihak pada kebutuhan mereka. Alih-alih mampu mengidentifikasi fakta hilangnya kebersamaan dan energi kolektivitas masyarakat, intervensi kebijakan seakan tak bosan untuk terus berfokus pada tujuan mengatasi tataran gejala yang tampak dari luar. Bertolak dari kesenjangan inilah, komunitas difabel desa dihadirkan untuk menambal *distrust* yang nyatanya turut menjadi indikasi lemahnya modal sosial sebagai penyedia energi kolektif masyarakat [19]. Hal ini sekaligus menghighlight pentingnya penerimaan berbagai pihak sebagai alternatif penyelesaian yang lebih efektif sekaligus berkelanjutan. Inilah yang secara langsung terkait dengan tujuan inklusi. Secara definitif, pengertian inklusi kerap dimaknai sebagai pendekatan untuk membangun lingkungan yang sarat keterbukaan dan mampu optimal menjamin hadir serta terakomodasinya partisipasi semua orang terlepas dari perbedaan latar belakang, karakter, kemampuan, status/kondisi, perbedaan etnis hingga budaya [20]. Meski masih dilakukan di tataran akar rumput, dengan hadirnya lingkungan inklusif yang sarat kepercayaan serta iklim saling merangkul, semakin mudah penegakan hak dan kewajiban mengingat tiap orang telah memiliki komitmen yang sejalan. Individu-individu didalamnya pun akan terus merasa aman dan nyaman menegakkan haknya. Mereka tak lagi ragu untuk bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung.

Penelitian ini mendapati bahwa pemaknaan pada unsur-unsur modal sosial seperti kepercayaan, partisipasi dalam jaringan, resiprositas, nilai, norma dan tindakan proaktif amat mempengaruhi karakteristik serta capaian agenda desa inklusi dari KDD Gulurejo dan FDS. Adapun uraian seputar bagaimana modal sosial bekerja mempengaruhi gerakan desa inklusi di kedua komunitas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut,

3.1 Kepercayaan

Pemaknaan modal sosial banyak menghighlight kepercayaan sebagai unsur penting pencipta kolektivitas dan inisiatif. Kepercayaan merujuk pada keinginan individu untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya, didalamnya terbentuk perasaan yakin bahwa orang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam pola tindakan saling mendukung [19]. Masyarakat yang memiliki potensi modal sosial kuat ditandai dengan kapabilitas *trust* yang tinggi dan *spectrum of trust* yang panjang. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki potensi modal sosial lemah akan menampilkan kapabilitas *trust* rendah dan *spectrum of trust* yang sempit [21]. Bertolak dari sini, kepercayaan turut dianalogikan sebagai penentu daya tahan suatu komunitas [22].

Pada aspek *trust*, perbedaan karakteristik pergerakan diantara KDD Gulurejo dan FDS sangat terlihat pada bagaimana kedua komunitas memandang kepercayaan sebagai pemantik sekaligus aset gerakan. Karakteristik ini menciptakan identitas tentang bagaimana mereka membangun kepercayaan, apakah hanya memusatkan perhatiannya pada peningkatan kohesivitas internal secara eksklusif atau turut mempertimbangkan pentingnya memperluas kepercayaan pihak-pihak eksternal yang dianggap potensial mendukung pergerakan.

Problematika minimnya partisipasi difabel gulurejo menjadikan KDD Gulurejo memilih untuk terlebih dahulu menghadirkan langkah-langkah strategis guna menumbuhkan kepercayaan difabel pada kemampuan dan peran potensial kolektivitas. Pendekatan yang diambil pun tidak secara langsung mengarah pada peningkatan frekuensi partisipasi difabel dalam forum publik berikut pula dengan agenda radikalnya, melainkan lebih berfokus pada penciptaan ruang yang secara emosional dapat menjamin difabel leluasa mengekspresikan keresahan dan aspirasi. Temuan ini sebagaimana apa yang didapati oleh Brown dan Smith (2019) dimana faktor-faktor internal seperti motivasi dan minat individu memiliki dampak yang signifikan pada seberapa besarnya loyalitas terlibat dalam gerakan sosial. Prioritas KDD Gulurejo memperkuat kepercayaan internal berkorelasi positif pada makin terciptanya kekuatan dan kesadaran menjalin kerjasama, hubungan imbal balik serta kemudahan mobilisasi anggotanya dalam kegiatan komunal [23]. Namun meski demikian, manfaat *trust* bisa dikatakan terus mengendap di dalam lingkup internal komunitas, tanpa turut difungsikan sebagai sumber daya komunitas memperluas cakupan isu dan pengaruh. Kohesivitas internal yang terus diperkuat dari waktu ke waktu, nyatanya menimbulkan konsekuensi ambivalen dalam bentuk eksklusivitas gerakan, ragam layanan mainstream dan sempitnya rentang kepercayaan.

Disisi lain melalui pengalaman dan bentuk kerjasama, FDS membuktikan peran penting kepercayaan sebagai penentu keberhasilan pergerakan. FDS sedari awal berupaya untuk menciptakan kepercayaan kolektif yang tak hanya bertumpu pada kohesivitas internal melainkan konsisten melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam agenda desa inklusi. Tak hanya berkontribusi positif pada kian terjawabnya keraguan akibat stigma diskriminatif masyarakat sekaligus kebiasaan pemerintah desa mengabaikan pentingnya perspektif difabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, strategi FDS memperkaya trust lewat mobilisasi berbagai unsur masyarakat terus berimplikasi positif pada munculnya inovasi, kreativitas, *sense of belonging* dan cakupan jaringan yang lebih luas. Kepercayaan yang hendak ditampilkan FDS tidak hanya mengendap pada internal komunitas melainkan terus diperluas meliputi individu-individu yang sebelumnya tidak saling mengenal dan berinteraksi. Keselarasan pemahaman menimbulkan rasa nyaman dan percaya untuk saling bekerjasama memecahkan suatu permasalahan [24]. Hal ini turut menggambarkan temuan unik bahwa heterogenitas dalam pergerakan FDS mampu menjamin hadirnya rentang kepercayaan yang lebih luas.

3.2 Partisipasi Dalam Jaringan

Jaringan hubungan sosial cenderung diwarnai oleh suatu tipologi khas yang sejalan dengan karakteristik maupun orientasi dari suatu kelompok. Kelompok

yang terbentuk secara tradisional berdasar kesamaan garis turun temurun (*repeated social experience*) maupun kesamaan kepercayaan pada dimensi kebutuhan (*religious beliefs*) cenderung memiliki kohesifitas tinggi tetapi memiliki rentang jaringan yang sempit [25]. Sebaliknya kelompok yang dibangun atas dasar kesamaan orientasi dan tujuan lengkap dengan tata kelola organisasi yang lebih modern akan memiliki tingkat partisipasi anggota yang lebih baik sekaligus rentang jaringan yang lebih luas [19].

Dikaitkan dengan informasi yang berhasil peneliti himpun di lapangan, terdapat perbedaan karakteristik jaringan yang ditampilkan oleh KDD Gulurejo dan FDS. Meskipun memiliki ketersediaan jaringan internal yang mampu menyokong aktivitas pergerakan, pemaknaan pada kebermanfaatan jaringan eksternal terus mempengaruhi orientasi dan prioritas arah gerakan diantara keduanya. Kegiatan advokasi dianggap kurang relevan menjadi identitas KDD Gulurejo sebab mayoritas anggotanya yang berusia lanjut usia cenderung menerima status quo menjaga keteraturan. Alih-alih turut berfokus pada aktivitas lobbying dan advokasi, mayoritas anggota cenderung lebih tertarik pada kegiatan praktikal yang dapat membantu mereka mengisi waktu luang dengan produktif. Disisi lain, dominasi peran pemerintah lewat akses penganggaran dan dukungan sarana prasarana membuat KDD Gulurejo tidak memiliki interest memperluas cakupan kerja sama dengan pihak eksternal. Apa yang menjadi perhatian dari komunitas terletak pada upaya *fight against* sebab mendasarkan penyelesaian isu difabel dengan memperkuat identitas spesik, menjaga nilai-nilai yang telah turun temurun dan memelihara kesetiaan internal [26].

Perbedaan pemaknaan pada arti penting jaringan ditunjukkan oleh FDS Sidorejo. Idealisme FDS yang konsisten memaknai eksistensi difabel desa sebagai aset pergerakan terus bermuara pada makin bervariasinya inisiatif difabel mewujudkan peningkatan kapasitas yang mampu memperkuat kemandirian dalam advokasi maupun aktualisasi diri. Tak hanya tampil aktif dalam forum musyawarah pembangunan kalurahan dan rencana kerja pembangunan, partisipasi anggota dalam jaringan internal juga terus diperkaya dengan keterlibatannya pada forum audiensi, seminar, workshop, diskusi, forum group discussion hingga media kesenian. Strategi FDS ini nyatanya memiliki korelasi positif pada semakin meningkatnya solidaritas. Solidaritas menjadi bukti nyata sejauh mana seseorang berkomitmen untuk mengembangkan komunitas sosial [27]. Melalui insiatif aktif anggota, semakin tercipta link jaringan yang menghubungkan FDS dengan organisasi-organisasi eksternal seperti Jaringan Inklusi Kabupaten Kulon Progo (JARIK ROGO), Persatuan Penyandang Disabilitas Kabupaten Kulon Progo (PPDKP), Difabel Tanggap Bencana (DIFAGANA) Komunitas Motor Roda Tiga, NPC dan organisasi difabel lintas kabupaten lainnya. Kebermanfaatan berjejaring dengan berbagai LSM seperti SIGAB, OHANA, CIQAL, YAKKUM dan SAPDA hadir dalam tersedianya akses informasi terkini seputar pemenuhan hak difabel, update kebijakan, strategi advokasi hingga peningkatan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pergerakan FDS konsisten tampil dalam berbagai pola interaksi dialogis Pun begitupun dengan karakteristik kolektivitasnya yang tak jemu melibatkan berbagai perspektif, tak secara sempit difungsikan sebagai sarana difabel mencapai

keuntungan melalui peningkatan kapasitas ekonomi. Keterbukaan memberi warna pada pola partisipasi FDS Sidorejo yang terus menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi berbagai pihak, pergerakannya pun terus menonjolkan kolaborasi yang inklusif. Agar dapat lebih berdaya, maka harus berinteraksi dan membentuk *networking* yang kuat. Karakteristik pergerakannya tak terlepas dari upaya inisiatif memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat maupun kolektivitas eksternal lain yang memiliki jangkauan lebih luas. Orientasi FDS merefleksikan kemauan “*fight for*” yang merujuk pada upaya pencarian jawaban bersama untuk menyelesaikan masalah. FDS secara nyata menampilkan bahwa keberagaman jaringan benar-benar memainkan peran krusial dalam memperkuat pengaruh sekaligus menjawab berbagai tantangan memperluas cakupan gerakan

3.3 Resiprositas

Resiprositas yang kuat dan tinggi di antara masyarakat ataupun kelompok sosial akan memberi andil positif pada semakin tingginya tingkat kepercayaan. Tak hanya itu, resiprositas juga akan mempermudah masyarakat untuk membangun diri, kelompok, lingkungan sosial maupun fisik [19]. Selain dipengaruhi oleh isu dan agenda pergerakan, karakteristik resiprositas dalam pergerakan KDD Gulurejo dan FDS Sidorejo tak terpisahkan dari kebiasaan pertukaran timbal balik yang selalu dipertahankan oleh realita sosial disekitar mereka. Pergerakan KDD Gulurejo dan FDS Sidorejo menampilkan temuan unik tentang resiprositas sebagai sumber daya pergerakannya.

Praktik gotong royong masyarakat desa memiliki peran sentral dalam membentuk pola pikir dan perilaku difabel gulurejo. Tuntutan untuk memperlihatkan keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan komunal terus mendorong kesepahaman bahwa penting untuk senantiasa memperkuat solidaritas internal. Meskipun memiliki kebebasan untuk mengembangkan identitas dan praktik sosial mereka sendiri, difabel Desa Gulurejo lebih memilih untuk konsisten menampilkan kesinambungan pergerakannya dengan kebiasaan-kebiasaan yang telah sejak lama dipraktikkan oleh masyarakat. Resiprositas mengakomodasi kebutuhan memperkuat persatuan dan ketahanan, menghadapi ketiadaan aktor hingga keterbatasan sumber daya yang mereka hadapi bersama. Perhatian besar pada resiprositas juga mempengaruhi pilihan KDD Gulurejo yang lebih mengintensifkan pendekatan personal sebagai strategi membangun kepedulian difabel. Meskipun sederhana, pertukaran sumber daya, dukungan, dan informasi antar anggota menjadi *highlight* penting dari bentuk solidaritas yang terjalin. Bertolak dari situ, KDD Gulurejo kian menonjolkan *branding* sebagai komunitas yang mengedepankan iklim kekeluargaan, saling tolong menolong dan melakukan segala sesuatunya dengan penuh ikhlas untuk kebaikan bersama.

Dikaitkan dengan eksistensi FDS, Aktivitas pergerakan difabel yang mereka tampilkan tentu tak terlepas dari motivasi yang melatarbelakangi tiap anggota untuk berpartisipasi dan ambil bagian. Ketika motivasi yang muncul berkaitan dengan komitmen dan ketulusan menghadirkan kolektivitas yang terus berorientasi pada pemecahan masalah, maka akan menghasilkan pergerakan yang memiliki daya keberlanjutan lebih tinggi dan tentunya dapat dijadikan modal potensial bagi pergerakan difabel kedepannya. Bertolak dari sini, FDS mampu mengaitkan

resiprositas dengan lebih progresif dibanding KDD Gulurejo. Resiprositas yang FDS berusaha tampil dan kembangkan terus berkaitan dengan cita-cita menciptakan lingkungan yang inklusif dengan hadirnya perubahan perilaku, kebiasaan dan komitmen sarat penerimaan berbagai pihak pada agenda desa inklusi. Hubungan timbal baliknya tidak berlangsung eksklusif, tetapi juga melibatkan interaksi dengan berbagai unsur masyarakat. FDS Sidorejo mampu mengaktualisasikan prinsip bahwa resiprositas bukan hanya penting, tetapi juga menjadi pilar utama dalam pergerakan sosial masyarakat. Tingginya resiprositas berkorelasi positif pada makin kuatnya kohesi sosial, terbangunnya kepercayaan dan kolaborasi guna menciptakan perubahan yang lebih luas.

3.4 Nilai

Nilai-nilai banyak dipahami sebagai ide yang telah turun temurun dianggap benar dan dijunjung tinggi oleh masyarakat [19]. Dominasi ide tertentu dalam masyarakat akan membentuk sekaligus mempengaruhi aturan-aturan bertindak masyarakat (*the rule of conducts*) dan aturan-aturan bertingkah laku (*the rule of behavior*). Pada perkembangannya, dua jenis aturan tersebut akan membentuk pola kultural (*kultural patern*). Pada masyarakat yang tertutup, nilai-nilai yang muncul akan banyak dipengaruhi oleh tradisi yang kuat, norma-norma yang mapan, dan identitas kelompok yang eksklusif. Budaya yang telah lama terjaga dan dipertahankan oleh generasi-generasi sebelumnya menjadi fondasi dari nilai-nilai yang turun temurun dipertahankan generasi baru. Sebaliknya, masyarakat yang terbuka cenderung lebih responsif terhadap perubahan, beragam pandangan, dan nilai-nilai baru. Meski menekankan pada terciptanya inklusivitas sebagai agenda utamanya, perbedaan karakteristik tiap desa nyatanya memiliki implikasi besar dalam mempengaruhi fokus capaian gerakan desa inklusi yang dilakukan komunitas difabel di dua desa tersebut.

Kalurahan Gulurejo menjadi salah satu kalurahan di Kapanewon Lendah yang masih memegang kuat tradisi komunal seperti genduren, tirakatan hingga sambatan. Kepercayaan pada pentingnya tolong-menolong menjadi prinsip hidup yang terus memunculkan kewajiban sosial untuk ikhlas berkontribusi pada urusan bersama. Namun meski demikian, problematika eksklusi yang menimpa difabel desa seakan terus dipandang sepele sebab dianggap dapat teratasi lewat tradisi gotong royong dan kebersamaan erat diantaraarganya. Realita-realita inilah yang menciptakan nilai-nilai yang mempengaruhi arah gerak KDD Gulurejo. Alih-alih vokal menonjolkan nilai-nilai inklusivitas, KDD Gulurejo percaya bahwa inklusi hanya bisa ditampilkan kala kebersamaan dan gotong royong telah termuat dan terinternalisasikan dalam pergerakan maupun keseharian sosial mereka di masyarakat. Pada konteks ini, nilai kebersamaan dan keteraturan yang memuat kepercayaan, kepatuhan dan relevansi nilai-nilai tradisional terus memantapkan keputusan KDD Gulurejo mengadopsi nilai-nilai komunal yang terkandung dalam pergaulan masyarakat dibanding harus bersusah payah menciptakan nilai-nilai baru

Berbeda dengan orientasi tradisional yang menjadikan KDD Gulurejo terus konsisten mempertahankan nilai-nilai komunal, pembentukan berbagai organisasi masyarakat di desa sidorejo menyiratkan telah hadirnya inisiatif aktif masyarakat membangun iklim pergerakan sosial di tingkat lokal. Kehadiran berbagai organisasi

di tingkat desa tak hanya difungsikan sebagai wadah untuk berkumpul melainkan juga sebagai sarana meningkatkan visibilitas, pengaruh dan posisi tawar dalam mewujudkan *interestnya* masing-masing. Dibanding apa yang ditampilkan dalam pergerakan KDD Gulurejo, terjadi pergeseran paradigma di mana FDS mampu memadukan nilai-nilai kolaborasi dan semangat pergerakan masyarakat dengan cita-cita inklusif khas pergerakan difabel. Mereka menyadari bahwa inklusi memainkan peran penting dalam membangun penerimaan antara difabel, pemerintah dan masyarakat utamanya dalam mengikis akar permasalahan difabel desa yang nyatanya bersumber dari distrust yang telah dilakukan dari waktu ke waktu. FDS mampu memperkenalkan nilai penerimaan dan kolaborasi yang menjamin karakteristik progresif dapat selalu termunculkan, yang tentunya tak kehilangan peran sosial sebagai bagian dari keseluruhan masyarakat sekaligus keberfungsian kolektivitasnya sebagai sarana advokasi aspirasi difabel.

3.5 Norma

Penelitian mendapati realita unik seputar absennya produk aturan tertulis dalam gerakan desa inklusi yang dilakukan KDD Gulurejo dan FDS. Wacana menghadirkan peraturan rigid dan sanksi yang mengikat berpengaruh memunculkan pemikiran bahwa kolektivitas tidak akomodatif memahami kendala akses serta minimnya pengalaman difabel desa berorganisasi. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan esensi arah gerak komunitas difabel desa yang sedari awal menitikberatkan pada terciptanya rasa nyaman serta percaya difabel pada potensi diri maupun kolektivitasnya. Bertolak dari pertimbangan tersebut, kedua komunitas sepakat tidak memiliki perhatian untuk memproduksi norma yang mengikat anggotanya. Komitmen anggota diperkuat lewat kepercayaan, resiprositas dan kepatuhan pada nilai maupun norma pergaulan yang telah secara alami mereka internalisasikan dalam kesehariannya. Keteraturan yang ada berimplikasi pada semakin munculnya tanggungjawab sosial difabel desa pada kepercayaan yang telah diberikan termasuk pula pada andil mereka dalam memaksimalkan kontribusinya memajukan organisasi yang telah memberi akses bagi mereka untuk makin produktif. Komitmen dan kesadaran dinilai lebih efektif mengatur tindakan tiap anggotanya dibanding harus menyibukkan diri memproduksi berbagai aturan tertulis yang pada akhirnya mempersempit ruang gerak pergerakan maupun individu difabel. Dikaitkan dengan sepak terjang pergerakan FDS, hadirnya bermacam peraturan mengikat dan berjenjang juga dikhawatirkan dapat menciptakan batasan bagi anggota untuk senantiasa mengutamakan dan memaksimalkan kontribusi mereka pada FDS. Ketentuan inilah yang dipercaya makin memperbesar peluang eksklusivitas sebab menjadikan FDS tak memiliki perhatian pada konsep inklusivitas dari sudut pandang komunitas rentan marjinal lainnya.

3.6 Tindakan Proaktif

Sebagaimana kita ketahui, agenda desa inklusi menjadi sebuah proses panjang yang tak lantas berhenti dengan terpenuhinya parameter-parameter inklusivitas. Semakin minim perhatian suatu organisasi pada pentingnya tindakan proaktif, maka semakin besar pula peluang organisasi menghadapi stagnansi dalam

menyelesaikan permasalahan bersama. Penelitian mendapati bahwa KDD Gulurejo dan FDS Sidorejo cenderung mengaitkan tindakan proaktif sebagai upaya adaptif mengoptimalkan fungsi, pengaruh dan keberlanjutan kolektivitasnya masing-masing. Kehadiran aktor difabel, keaktifan, ragam jaringan sosial dan komitmen pemerintah desa pada isu difabel menjadi bukti perbedaan capaian tiap komunitas difabel desa.

Pergerakan KDD Gulurejo amat berkaitan erat dengan nuansa ide, hubungan dan perhatian komunitas pada aspek-aspek yang bersifat *inward looking*. Tindakan proaktif yang berusaha ditampilkan KDD Gulurejo pun menjadi terkait erat dengan upaya memperkuat hubungan sekaligus menciptakan rasa kebersamaan diantara anggota. Dalam kaitannya dengan semangat berorganisasi difabel desa, tindakan proaktif ditampilkan pada keinginan difabel desa gulurejo untuk terus berpartisipasi dalam setiap kegiatan KDD Gulurejo. Ketika kegiatan rutin mengalami penundaan jadwal, difabel desa tak segan bertanya dan mendesak pengurus untuk segera mengadakan pertemuan rutin. Loyalitas anggota difabel gulurejo merefleksikan keunggulan pada aspek kekuatan dan kesadaran menjalin kerjasama, resiprositas dan memobilisasi anggotanya dalam konteks solidaritas kelompok. Pembiasaan ini menggerakkan tindakan proaktif dan inisiatif untuk membantu baik secara materil maupun kontribusi dalam bentuk perbuatan. Praktik semacam ini juga turut ditemukan oleh Dutton dan Ragins (2007) dimana aktivitas komunal dan iklim kekeluargaan terus meningkatkan rasa saling peduli, dukungan dan kepercayaan untuk terus berkontribusi aktif [28].

Pola-pola pergerakan progresif turut menimbulkan tantangan yang lebih kompleks bagi FDS untuk terus mempertahankan keharmonisan dan keteraturan. Keterlibatan banyak pihak berikut dengan beragamnya perspektif berimplikasi pada makin kompleksnya pengambilan keputusan dan koordinasi aksi termasuk pula pada bagaimana komunitas menjaga konsistensi gerakan [29]. Temuan-temuan ini ditampilkan dalam sepek terjang FDS Sidorejo dimana meskipun telah terdapat inisiatif mengembangkan jaringan lewat keterlibatan anggota dalam organisasi eksternal, pergerakan FDS banyak memuat sikap *pakewuh* anggota pada peran pemimpin. Inisiatif difabel desa untuk memperluas jaringan dan meningkatkan aktualisasi diri dalam komunitas eksternal berpengaruh pada semakin banyaknya waktu yang terforsir untuk urusan-urusan diluar FDS.

Menghadapi dinamika tersebut, FDS Sidorejo bertindak progresif lewat beragam penyesuaian. Kolaborasi proaktif FDS dan Pemerintah Desa Sidorejo meningkatkan partisipasi warga dan difabel desa dalam forum-forum peningkatan perspektif difabilitas sekaligus perancangan Forum Temu Inklusi Difabel Lendah pada tahun 2024. Upaya akomodatif FDS juga termasuk pada keinginannya memberlakukan sistem kepengurusan yang adaptif dengan memadukan keterlibatan aktor sentral dan kaderisasi aktor difabel baru. Aktor-aktor difabel baru potensial akan mulai dibiasakan mandiri mengatur urusan yang berkaitan dengan mobilitas seperti perluasan jaringan dan pengelolaan organisasi. Sementara pengurus lama akan diposisikan sebagai *back up* yang memperkuat tata kelola dan memberi berbagai masukan pertimbangan. Tak hanya itu, FDS berusaha terus melibatkan keluarga pendamping dalam kepengurusan sehingga diharapkan dapat semakin mengoptimalkan pergerakan lewat tersedianya sumber daya penggerak

yang lebih memadai. Ragam tindakan proaktif FDS bisa dikatakan selangkah lebih maju lewat pemikiran dan inisiatif aktifnya mengantisipasi sekaligus menghadapi peluang munculnya *dark side of social capital* yang ditandai dengan kecenderungan sikap *pakewuh* anggota melanjutkan pergerakan tanpa sosok ketua FDS.

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa modal sosial menentukan keberhasilan agenda desa inklusi yang dilakukan oleh Komunitas Difabel Desa (KDD) Gulurejo dan Forum Difabel Sidorejo (FDS). Tak hanya menjadi wadah inovasi dan jejaring, kehadirannya telah mampu memunculkan berbagai perubahan positif seperti pengakuan eksistensi, perhatian pada kepentingan dan kebutuhan, ketersediaan akses melakukan interaksi sosial, terpenuhinya hak dan tersedianya sumber daya untuk menjamin partisipasi penuh difabel. Melalui kolektivitasnya, difabel desa dapat berkontribusi aktif melawan *distrust* yang kerap kali termuat dalam hambatan sikap, lingkungan dan kelembagaan sembari mendorong pergeseran intervensi dalam bentuk program bermekanisme *bottom-up* yang dilakukan tanpa mengabaikan kapabilitas sekaligus potensi modal sosial dalam penyelesaian masalah bersamanya.

Meski telah membuktikan kehadirannya sebagai salah satu alternatif penyelesaian isu difabel desa yang berdampak gemilang, dengan membandingkan dua kolektivitas, penelitian ini turut mendapati perbedaan mencolok terkait unsur partisipasi dalam jaringan serta dampak yang ditimbulkannya pada efektifitas pergerakan agenda desa inklusi. Dengan memanfaatkan beragam jaringan yang tersedia, FDS mampu mengemas pergerakannya tetap progresif termasuk menghadirkan jaminan keberlanjutan agenda inklusi yang mampu secara kolaboratif melibatkan berbagai *stake holder* untuk selalu berkomitmen memaknai inklusivitas sebagai agenda bersama. Realita ini membuktikan keunggulan FDS yang tak hanya terpaku pada mobilisasi modal sosial yang menjembatani namun berhasil menampilkan karakteristik modal sosial yang menghubungkan dalam pergerakannya, lebih luas dibanding KDD Gulurejo yang konsisten menitikberatkan mobilisasi modal sosial mengikat sebagai sumber daya pergerakannya. Bertolak darisini, terdapat temuan penting bahwa pemaknaan pada unsur-unsur modal sosial seperti kepercayaan, partisipasi dalam jaringan, resiprositas, nilai, norma dan tindakan proaktif berimplikasi pada terciptanya karakteristik serta perbedaan capaian agenda desa inklusi dari kedua komunitas tersebut.

Referensi

- [1] Hidayatullah A. N., dan Pranowo, P, Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas, *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, vol. 17, no. 2, hal. 195-206, 2018.
- [2] Suryaden, A., *Integrasi Difabilitas di Implementasi UU Desa dan PP 43 dan 60 Tahun 2014*. 2014
- [3] Zulfikar, F., *Partisipasi Kaum Difabel dalam Pembangunan Desa Inklusi: Studi Kasus Desa Sidorejo, Kulon Progo*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.

- [4] Priebe, J., & Fiona H., The Life of People with Disabilities: An Introduction to Survey on the Need for Social Assistance Programmes for People with Disabilities (SNSAP-PWD 2012), *TNP2K Indonesia*, 2012
- [5] Sucahyo Nurhadi, *Penyandang Disabilitas Respon Positif Undang-undang Baru*, [online]. Tersedia: <https://www.voaindonesia.com/a/penyandang-disabilitas-respon-positif-undang-undang-baru/3367035.html>. [Diakses 26 Maret 2021]
- [6] Human Right Watch. “*Hidup di Neraka: Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas Psikososial di Indonesia*”, [online]. Tersedia: https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/indonesia0316bahasa_brochure_w eb.pdf [Diakses 26 Maret 2021]
- [7] Probosiwi, R., Desa Inklusi Sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Penyandang Disabilitas, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, vol. 41, no. 3, hal. 217-228, 2017
- [8] Simarmata, R., Perspektif Inklusi Sosial dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Kebijakan dan Tantangan Implementasi, *Jurnal Transformasi Sosial*, hal. 7-27, 2017
- [9] Levi, M., *A State of Trust*, Firenze, European University Institute/Robert Schumann Centre, 1996
- [10] Fukuyama, F., *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, New York, The Free Press, 1995
- [11] Bourgon, J., Responsive, Responsible and Respected Government: Towards a New Public Administration Theory, *International Review of Administrative Sciences*, vol. 73, no. 1, hal. 7-26, 2007
- [12] Maftuhin, A., Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori dan Indikator, *TATA LOKA*, vol. 19, no. 2, hal. 93-103, 2017
- [13] Barnes C., & Mercer G., Disability, Work and Welfare: Challenging the Social Exclusion of Disabled People. *Peach Research Abstract Journal*, vol. 43, no. 1, 2006
- [14] Syahra R, Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, vol. 5, no. 1, hal. 1-22, 2003
- [15] Haridison, A., Modal Sosial dalam Pembangunan. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Ilmu Pemerintahan*, vol. 2, no. 2, hal. 31-40, 2013
- [16] Soetomo, *Masalah Sosial Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2018
- [17] Gotto, G. S., *Accessing Social Capital: Implications for the Persons with Disabilities.*, United States: US Department of Health and Human Services. [Online]. Tersedia: <https://www.aucd.org/docs/Accessing%20Social%20Capital%20Implications%20for%20Persons%20With%20Disabilities%2C%20Final.pdf> [Diakses: 2 Januari 2023]
- [18] Grootaert, C., Social Capital: The Missing Link? The World Bank Social Development Family, Environmentally, and Socially Sustainable Development Network, Social Capital Initiative, *Working Paper*, vol. 3, 1997
- [19] Hasbullah, J., *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*, Jakarta, MR-United Press, 2006
- [20] Lenoir, R., *Les Exclus: Un Framcais Sur Dix*, Paris, Seuil Publication, 1974
- [21] Field, J. *Modal Sosial* (terjemahan), Bantul, Kreasi Wacana, 2010
- [22] Paldam, M. Social Capital: One or Many? Definition and Measurement, *Journal of Economic surveys*, vol. 14, no. 5, hal. 629-653, 2000
- [23] Brown, A., & Smith, B., Exploring Disability Inclusion in Rural Development Programs: Insights from Uganda. *Development in Practice*, vol. 29, no. 5, hal. 616-629, 2019

- [24] Syahyuti, Peran Modal Sosial (Social Capital) dalam Perdagangan. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 26, no. 1, hal. 32-43, 2008
- [25] Mawardi, M. J., Peranan Social Capital dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 3, no. 2, hal. 5-14, 2007
- [26] Putnam, R. D., Bowling Alone: The Collapse and Revival American Community, *Journal of Democracy*, vol. 6, hal. 65-78, 2008
- [27] Badaruddin. *Modal Sosial (Social Capital) dan Pemberdayaan Komunitas Nelayan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005
- [28] Ragins, B. R., & Dutton, J. E., Exploring Positive Relationships at Work: Building a Theoretical and Research Foundation, *Lawrence Erlbaum Associate Publisher*, hal. 29-45, 2007
- [29] McAdam, D., Tarrow S., & Tilly, C., *Dynamics of Contention*, Cambridge University Press, 2001